Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/
enrichment of public governance

(Original Article)

Evaluasi Implementasi Program Rumanis Datang Si Kumis Hilang sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Wonogiri

Masykurotur Rizqi Aji Putri[1*], Muhammad Emir Al-Azkiya[1], Bambang Dewanto[1], Yemima Inanse Orpa Dimara[1], Rutiana Dwi Wahyunengseh[1], Asal Wahyuni Erlin Mulyadi[1]

[1]Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
*Correspondence: masykuroturrizqi0608@gmail.com

Abstract
The alleviation of extreme poverty is one of the main focuses of the Wonogiri Regency Government. Data from Bapperida Wonogiri in 2024 show that there were 136,799 heads of households or 497,154 people, included in the extreme poverty category in Wonogiri. This study aims to assess the success of the implementation of Rumanis Datang Si Kumis Hilang program as a manifestation of the Wonogiri Regency Government's commitment, particularly the Public Housing, Settlement Area, and Land Service in addressing extreme poverty by providing habitable housing. Additionally, the study seeks to assessing the results of implementation evaluation within the Rumanis Datang Si Kumis Hilang program. The research method that used in this research is qualitative, using a case study approach. The study's results indicate that the Rumanis Datang Si Kumis Hilang program has been successful, as evidenced by the achievement of its objectives. In general, two out of the three objectives of this program can be considered successful (1) the provisioun of stimulus funds to low-income communities, which was supported by various stakeholder and (2) a reduction in the number of uninhabitable houses (RTLH) in Wonogiri every year. However, despite the success, several shortcomings need to be addressed to maximize the impact to the community. These include funding sources, which are still considered insufficient for home repairs, despite support from multiple stakeholders, post-implementation monitoring of the program, and the need to increase the number of Field Facilitator members (TFL) to enhance the program effectiveness.

Keywords
evaluation of program implementation, Rumanis Datang Si Kumis Hilang, Wonogiri Regency

Received: 6 October 2024; Revised: 8 August 2025; Accepted: 27 August 2025

Pendahuluan

Pengentasan kemiskinan telah menjadi tantangan utama dunia selama beberapa dekade (Liu & Xu, 2016; Nugroho et al., 2021). Di Indonesia, kemiskinan ekstrem telah menjadi salah satu fokus pemerintah sejak tahun 2022. Hal ini tercermin dari munculnya Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui inpres tersebut, diharapkan adanya keterpaduan dan sinergitas program, serta kerjasama antar lembaga atau kementerian untuk mencapai 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 (Setkab RI, 2022). Berdasarkan hal tersebut, maka kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus utama untuk kinerja pemerintah, baik pemerintah daerah, kementerian, hingga lembaga, salah satunya Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri menjadi salah satu daerah yang menerapkan fokusnya kepada pengentasan kemiskinan ekstrem. Hal ini dapat dilihat dari hasil Musrenbang Kabupaten Wonogiri tahun 2022 di mana prioritas pertama program Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah pengentasan kemiskinan (Kominfo Wonogiri, 2021). Konsep kemiskinan sendiri dibagi menjadi dua menurut BPS, yaitu miskin dan miskin ekstrem. Miskin sendiri diartikan sebagai kesulitan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan garis kemiskinan atau tingkat pendapatan Rp550.458 per kapita per bulan (Adji et al., 2020; Sudarmadi, 2023). Sedangkan, miskin ekstrem didefinisikan sebagai masyarakat yang hidup dibawah Rp11.571,21 per kapita per hari atau Rp351.957,40 per kapita per bulan (Sudarmadi, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika dilihat dari kemiskinan secara global yang ada di Kabupaten Wonogiri, rata-rata pendapatan perkapita per bulan pada tahun 2023 adalah Rp 414.901,00 dan menempati peringkat ke-5 paling rendah di wilayah Jawa Tengah (BPS Jateng, 2024). Angka tersebut tentunya terbilang tinggi dan dibawah rata-rata Jawa Tengah, yaitu Rp 477.580,00 per kapita per bulan (KKI Jateng, 2023). Fakta tersebut berusaha diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri terutama bagi masyarakat yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem. Jumlah masyarakat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Wonogiri tahun 2023 sebanyak 136.799 KK atau 497.154 jiwa (Bapperida Wonogiri, 2024).

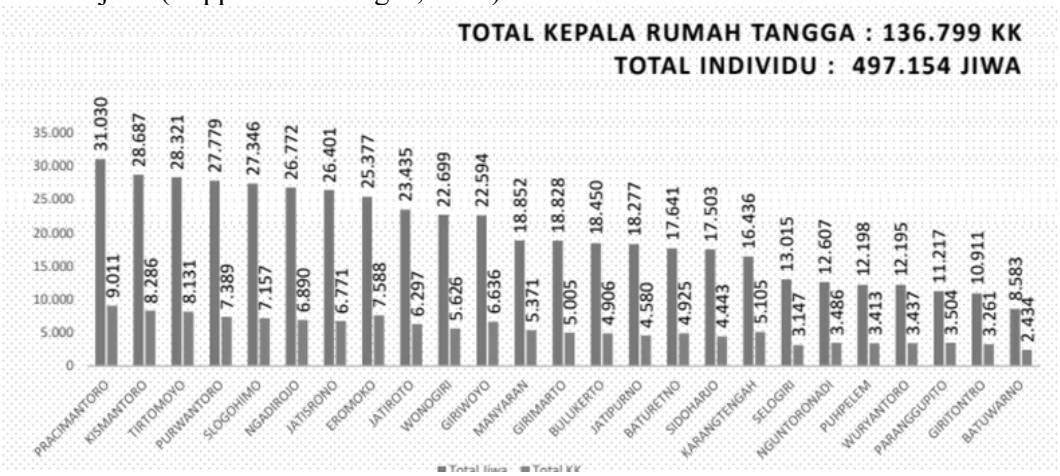

Gambar 1.
Jumlah Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Wonogiri
Sumber: Bapperida Wonogiri (2024)

Kondisi ini membuat pemerintah Kabupaten Wonogiri melakukan berbagai intervensi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Adapun intervensi yang dilakukan berdasarkan indikator kemiskinan ekstrem, salah satunya Rumah Kategori Tidak Layak Huni. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dispera dan KPP) Kabupaten Wonogiri, jumlah rumah tidak layak huni berkurang setiap tahunnya ditengah naiknya jumlah rumah di Kabupaten Wonogiri. Terakhir, hingga 2022 jumlah rumah tidak layak huni mencapai 5.603 unit. Angka tersebut berkurang drastis dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 17.413 unit (Diskominfo Wonogiri, 2023).

Gambar 2.
Jumlah RTLH di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2022
Sumber: Diskominfo Wonogiri (2023)

Selain turunnya angka RTLH di Kabupaten Wonogiri, pemilihan indikator pada penelitian ini yaitu karena dalam kategori tersebut juga memiliki keterkaitan dengan indikator lainnya seperti jamban, listrik, dan air bersih. Indikator ini berusaha diatasi dengan program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang*. Program ini merupakan salah satu inovasi non digital dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Program tersebut berupa memberikan bantuan peningkatan kualitas rumah dan sarana dan prasarana permukiman bagi keluarga miskin untuk memperoleh rumah layak huni dan sehat (Pemkab Wonogiri, 2022). Program ini juga merupakan program unggulan Kabupaten Wonogiri yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional melalui ajang *Innovative Government Award* atau IGA 2023 (Praditia, 2023).

Pendanaan program tidak hanya bersumber dari APBD, namun juga APBN, dan CSR dari Bank Jateng. Program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang* melibatkan banyak pemangku kepentingan, diantaranya Kementerian, Pemerintah Provinsi, pihak desa, hingga pihak swasta. Sejalan dengan itu, kolaborasi antar pihak seperti pemerintah, organisasi sektor swasta, dan masyarakat dapat membantu untuk mengatasi tantangan-tantangan sosial yang kompleks (Temitope, 2023). Lebih lanjut, kolaborasi antar *stakeholde*r dianggap sebagai faktor kunci dalam upaya mengurangi kemiskinan yang memerlukan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat (Dari et al., 2022).

Di samping itu, berdasarkan hasil penelusuran di Scopus, masih belum ada penelitian yang menyoroti tentang program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang* di Kabupaten Wonogiri. Sejauh ini, penelitian-penelitian di Wonogiri yang terindeks di *database* Scopus membahas tentang penilaian keberlanjutan DAS (Daerah Aliran Sungai) Bengawan Solo Hulu di Wonogiri (Rendrarpoetri et al., 2024), mitigasi risiko Bendungan Pidekso Wonogiri (Huseiny et al., 2024), implementasi kebijakan pemberian ASI eksklusif di Wonogiri (Pratiwi & Ernawaty, 2023), evaluasi kesesuaian lahan (Dewi et al., 2023), meningkatkan efektivitas mitigasi bencana (Setiawan & Adhi Pramana, 2023), aspek hukum dalam pengembangan desa wisata (Martitah et al., 2022), perubahan penggunaan lahan dan pemodelan resesi aliran dasar di DAS Wuryantoro, Wonogiri (Latuamury et al., 2022), dampak pemanfaatan lahan terhadap degradasi tanah di Giriwoyo, Wonogori (Mujiyo et al., 2021), penguatan kapasitas aparatur desa (Arifin & Sugiarto, 2020), karakteristik, sebab-akibat, dan perilaku bunuh diri di Wonogiri (Nurtanti et al., 2020), kepatuhan terhadap pengobatan pada pasien TBC (Ratnasari et al., 2020), memberdayakan perempuan di komunitas nelayan Wonogiri (Fitrianggraeni, 2019), dan distribusi logam berat di daerah pertambangan emas Wonogiri (Nurcholis et al., 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melihat apakah program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang* memang sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan ataukah belum. Hal ini penting untuk dilakukan karena kemiskinan ekstrem di Kabupaten Wonogiri masih tergolong tinggi dengan jumlah penduduk yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrem mencapai hampir 500 ribu jiwa (Bapperida Wonogiri, 2024). Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu (1) Mengetahui keberhasilan tujuan implementasi program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang*, sebagai upaya dalam peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Wonogiri, dan (2) Menilai hasil evaluasi implementasi pada program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang*, di mana hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang* yang digagas oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dispera dan KPP) Kabupaten Wonogiri.

Kajian Pustaka

Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2008) menyatakan bahwa implementasi adalah tahapan yang berlangsung setelah suatu peraturan atau undang-undang ditetapkan, yang menggambarkan wewenang program, kebijakan, serta manfaat yang ingin dicapai. Dari pernyataan tersebut, dapat diindikasikan bahwa implementasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mewujudkan hasil sesuai harapan publik maupun pemerintah. Dalam konteks ini, implementasi dapat berupa tindakan dari berbagai pihak yang berperan dalam menjalankan sebuah kebijakan atau program agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut pandangan lain yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008) menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor, baik dari pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan atau organisasi. Pernyatana dari Ripley dan Franklin serta Van Meter dan Van Horn tersebut menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan kebijakan publik yang awalnya masih bersifat abstrak menjadi bentuk nyata melalui langkah-langkah yang jelas, guna mencapai tujuan dan menghasilkan dampak sebagaimana yang telah direncanakan.

Dari pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan suatu proses yang kompleks dan penuh tantangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III yang menyatakan bahwa tanpa adanya pelaksanaan yang efektif, kebijakan yang telah dirancang dengan sabik apapun tidak akan berhasil dilakukan (Akib, 2012). Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Chief J. O Udoji yang menjelaskan bahwa implementasi memiliki peranan yang krusial, bahkan dianggap lebih penting dibandingkan proses pembuatan kebijakan itu sendiri, karena implementasi berfungsi sebagai penghubung antara proses perumusan kebijakan dan hasil akhir *(outcome)* diharapkan (R. Nugroho, 2020).

Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan tentunya dipengaruhi oleh beberapa indikator-indikator tertentu, seperti komunikasi, sumber daya, hingga komitmen dan konsistensi pelaksana. Adapun, beberapa ahli menyebutkan indikator-indikator yang berbeda dalam proses implementasi, salah satunya Van Meter dan Van Horn. Adapun indikator yang mempengaruhi implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu: 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Komunikasi organisasi, 4) Karakteristik birokrasi pelaksana, 5) Sikap pelaksana, dan 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Nugroho, 2020).

Standar dan Sasaran Kebijakan
Pertama terkait standar dan sasaran kebijakan akan menguraikan tujuan keseluruhan dari keputusan kebijakan. Artinya, ada standar yang konkret dan lebih spesifik dalam menilai kinerja. Menurut Van Meter dan Van Horn, tingkat keberhasilan dapat dilihat dari ukuran dan sasaran kebijakan. Dimana, para pelaksana perlu untuk menegaskan adanya standar dan sasaran kebijakan yang perlu untuk dicapai. Hal ini dikarenakan, suatu kinerja implementasi kebijakan merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran kebijakan tersebut.

Sumber Daya
Kedua, terkait dengan sumber daya, ini berbicara sumber daya manusia dan finansial secara spesifik. Sumber daya menjadi bagian yang sangat penting dimana dalam implementasi kebijakan perlu adanya kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia termasuk sumber daya manusia dan finansial. Sumber daya manusia merupakan kebutuhan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Maka dari itu, dalam implementasi kebijakan tentunya memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, sumber daya finansial juga menjadi indikator penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan.

Komunikasi Organisasi
Komunikasi organisasi terkait kualitas hubungan antar organisasi dalam konteks implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten antar organisasi maupun kepada penerima program. Koordinasi juga bagian penting dalam komunikasi, dimana dalam hal ini perlu dilihat koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Lebih detail, komunikasi berbicara mengenai koordinasi antar tingkat pemerintah, hubungan formal dan informal, jaringan, fleksibilitas dan adaptasi kebijakan, serta tantangan dan konflik dalam komunikasi itu sendiri.

Karakteristik Birokrasi Pelaksana
Karakteristik birokrasi pelaksana berbicara mengenai keterlibatan organisasi formal dan informal, isu-isu antar organisasi, termasuk juga sistem kontrol. Karakteristik birokrasi pelaksana juga berbicara terkait SOP yang ada dalam pelaksanaan implementasi kebijakan atau program. Artinya, para birokrat juga harus mengetahui SOP yang seharusnya terlaksana dalam pelaksanaan implementasi program atau kebijakan.

Sikap Pelaksana
Sikap pelaksana berbicara terkait pemahaman dan pengertian mereka terhadap kebijakan, respon terhadap kebijakan, serta intensitas dari respon tersebut. Sikap tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Respon tersebut bergantung pada pengaruh kebijakan terhadap kepentingan organisasi dan pribadi. Hal ini dikarenakan kebijakan publik biasanya bersifat top down sehingga sangat mungkin pengambil keputusan tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi sebenarnya.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
Terakhir adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pada upaya menilai kinerja implementasi kebijakan publik juga perlu dilihat sejauh mana lingkungan eksternal (sosial, ekonomi, dan politik) turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Permasalahan-permasalahan lingkungan eksternal mampu menjadi dukungan maupun penghambat

bahkan penekan terhadap keberhasilan implementasi.

Enam indikator menurut Van Meter dan Van Horn dapat saling berhubungan dan mempengaruhi secara terus – menerus sepanjang proses implementasi kebijakan sehingga yang dihasilkan adalah kinerja yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan model Van Meter dan Van Horn dari ke-enam indikator yang ada. Pemilihan model didasarkan pada dua alasan, yaitu 1) Model Van Meter dan Van Horn melihat ketercapaian tujuan sesuai dari maksud evaluasi implementasi, dan 2) Model tersebut mampu menggambarkan kinerja evaluasi kebijakan dari indikator-indikator yang dimunculkan.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi menurut Ripley merupakan sebuah konsep yang luas dikarenakan seluruh bagian dari proses dan kebijakan publik ini mampu menjadi objek evaluasi. Artinya disini, evaluasi dapat dilakukan terhadap keseluruhan proses atau tahapan kebijakan, mulai dari evaluasi formulasi hingga evaluasi kinerja. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini akan fokus kepada evaluasi implementasi. Ripley juga mengatakan bahwasannya evaluasi implementasi dapat dilakukan terhadap tujuan – tujuan substantif dan isi kebijakan atau program (Ekowati, 2009). Berbeda halnya dengan Lester & Stewart (2000) yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk menilai apakah kebijakan publik telah dilaksanakan dengan efektif dan berhasil memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Junaeny et al., 2025).

Sementara itu, dalam buku *Public Policy* karya Riant Nugroho mengungkapkan secara lebih rinci tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik, di mana ia menyatakan bahwa untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu : 1) Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik?, 2) Faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu?, dan 3) Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? (R. Nugroho, 2020). Penentuan kinerja dari implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan melakukan komparasi dengan berbagai hal, seperti tujuan, *historical,* hingga *best practice.*

Pada penelitian ini, kinerja atau *performance* dari implementasi dilihat melalui komparasi tujuan. Artinya, sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Dengan begitu, juga akan tercermin kesenjangan yang mungkin terjadi antara harapan dan realita. Lebih detail Dunn, membagi evaluasi implementasi menjadi tiga berdasarkan timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, saat dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan (R. Nugroho, 2020). Pada penelitian ini, evaluasi dilakukan dalam rentan waktu pelaksanaan implementasi, artinya hingga sekarang masih terdapat proses implementasi program yang dilakukan. Evaluasi ini disebut juga dengan evaluasi proses.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian evaluasi implementasi kebijakan dengan timing pada waktu dilaksanakan atau evaluasi proses. Peneliti juga menggunakan komparasi tujuan untuk melihat kinerja dari implementasi kebijakan. Hal tersebut didukung dengan model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang mampu melihat kinerja implementasi dan mampu menilai tujuan dari indikator pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan. Artinya, evaluasi implementasi ini nantinya akan melihat sejauh mana tujuan dari program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang* tercapai di Kabupaten Wonogiri.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang mendalam melalui berbagai sumber data (Creswell & Poth, 2018) terkait dengan implementasi program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang.* Penelitian dilakukan di Kabupaten Wonogiri, khususnya di Dispera dan KPP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan) Kabupaten Wonogiri dan daerah yang menjadi target program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang.*

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat kemiskinan ekstrem yang relatif tinggi dan sebagai pusat dari implementasi program tersebut. Penelitian dilaksanakan pada 29 April 2024 hingga 30 Mei 2024. Data dikumpulkan melalui beberapa cara yaitu wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian ini yaitu (1) Pejabat terkait dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri, (2) Penerima manfaat program terpilih berdasarkan kriteria tertentu, dan (3) Perangkat panitia RTLH (Rumah Tangga Layak Huni) di tingkat desa. Untuk menganalisis data pada penelitian ini digunakan teknik analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman yang terdiri atas tiga tahapan yang harus dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2014)

Validitas dan realibilitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, di mana peneliti menggunakan berbagai informan untuk memverifikasi kebenaran data yang telah diperoleh. Dengan melibatkan beberapa narasumber dan sudut pandang yang beragam, kualitas data dapat diuji dan harapannya data yang diperoleh dapat mendekati kebenaran. Adapun triangulasi sumber bertujuan menggali kebenaran informasi tertentu yang dapat dilakukan dengan berbagai metode dan sumber data (Barkah et al., 2020). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber data, seperti wawancara langsung, dan didukung oleh sumber data lainnya, seperti studi pustaka, media massa, dokumentasi, dan dari dokumen–dokumen resmi yang ada mengenai program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang.*

Hasil

Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian dan analisis mengenai evaluasi implementasi pada program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang* dalam upaya intervensi pengentasan kemiskinan pada indikator Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Analisis ini dijelaskan melalui model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dengan 6 indikator, yang terdiri dari: 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Komunikasi organisasi, 4) Karakteristik birokrasi pelaksana, 5) Sikap pelaksana, dan 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

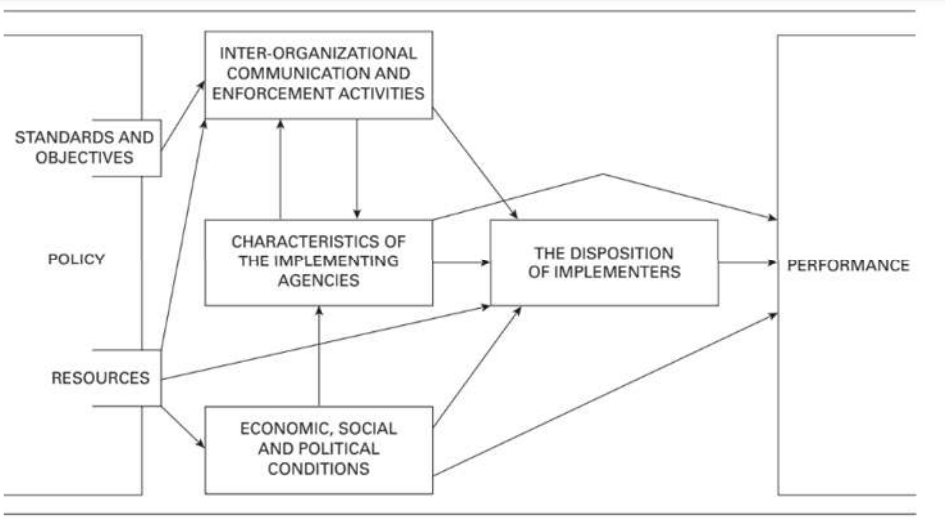

Gambar 3.
Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn
Sumber: Hill & Hupe (2021)

Standar dan Sasaran Kebijakan

Pada indikator standar dan sasaran kebijakan akan banyak membahas terkait tujuan keseluruhan dari keputusan kebijakan. Berdasarkan tujuan tersebut tentunya ada standar yang digunakan untuk mengukur tujuan. Adapula sasaran kebijakan juga termasuk bahasan pada indikator pertama. Program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang* merupakan program stimulan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal ini tercantum dalam Peraturan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dispera dn KPP) Kabupaten Wonogiri No 148 Tahun 2020. Adapun tujuan program, yaitu: 1) Memberikan stimulan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki Rumah Layak Huni, Aman, Nyaman, Indah dan Sehat (Rumanis), 2) Meningkatkan tradisi gotong royong dalam masyarakat, dan 3) Menghilangkan atau mencegah Kawasan Kumuh Miskin (Kumis).

Pertama, tujuan tersebut telah sesuai dengan Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Tujuan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah dalam upaya perbaikan RTLH dengan bantuan stimulan dan dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwasaannya dari pemerintah pusat hingga lingkup paling kecil yaitu desa memiliki tujuan sama untuk pengentasan kemiskinan dengan pemberian stimulan bagi RTLH. Lebih detail, ketiga tujuan tersebut tentunya memiliki standar yang jelas terkait ketercapaian.

Pertama, memberikan stimulan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki Rumah Layak Huni, Aman, Nyaman, Indah dan Sehat (Rumanis) dapat dilihat dari anggaran yang ditargetkan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah anggaran yang ditujukan kepada setiap rumah untuk melakukan perbaikan. Peningkatan tersebut tentunya berarti positif karena masyarakat akan mampu membangun rumah dengan anggaran yang lebih tinggi. Hal tersebut menandakan bahwasannya tujuan pertama untuk memberikan stimulan kepada masyarakat dengan berbagai anggaran baik APBN, APBD, Dana Desa, hingga CSR berhasil memberikan pengaruh untuk peningkatan anggaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Tujuan kedua yaitu meningkatkan tradisi gotong royong dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan dari Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri melalui wawancara diketahui bahwasannya tujuan kedua ini tidak memiliki indikator pasti untuk mengukur atau untuk menyatakan tujuan ini berhasil atau tidak. Sedangkan, pada sisi lain, pengukuran indikator ketercapaian tujuan menjadi penting dalam menilai kecukupan atau ketidakcukupan pencapaian tujuan atau indikator dari program yang dilaksanakan.

Ketiga, menghilangkan atau mencegah Kawasan Kumuh Miskin (Kumis). Tujuan ini dilihat keberhasilannya dari penurunan angka RTLH setiap tahunnya. Dimana target yang ditetapkan adalah 3.000 unit setiap tahun. Sejak awal berjalannya program ini yaitu tahun 2019 hingga terakhir tahun 2023, setiap tahunnya rumah yang mendapatkan stimulan dana mencapai lebih dari 3.000 unit kecuali tahun 2022 karena pengalihan anggaran untuk Covid-19, di mana pada tahun 2019, terdapat 4.010 unit rumah, tahun 2020 sebanyak 3.579 unit, tahun 2021 sebanyak 3.431 unit, tahun 2022 sebanyak 2.342 unit, dan tahun 2023 sebanyak 3.542 unit. Berdasarkan hal tersebut maka diketahui bahwasannya target dan tujuan ketiga tercapai.

Keberhasilan tujuan ketiga juga dilihat dari perubahan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Perubahan ini dapat dilihat sesuai kriteria rumah layak huni yaitu rumah yang memiliki keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Melihat kriteria-kriteria tersebut, berdasarkan hasil dari observasi di lapangan, maka dapat diketahui bahwasannya, rumah yang memperoleh stimulant dari program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang* telah memenuhi kriteria. Salah satu rumah yang peneliti kunjungi adalah milik Bu Titin. Sebelumnya rumah beliau bukan dari bangunan yang kokoh atau terbuat dari anyaman bambu hingga akhirnya sekarang memiliki struktur bangunan yang kokoh serta pencahayaan, hawa, serta suhu udara dan kelembaban yang bagus. Adapun contoh perubahan dari rumah yang dianggap sebagai tidak layak untuk ditinggali menjadi rumah layak ditinggali dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.

Gambar 4.
Proses Perubahan RTLH Menjadi RLH
Sumber: Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri (2024)

Selanjutnya, pada indikator pertama juga melihat sasaran. Sasaran yang dimaksudkan disini adalah sasaran penerima program, dimana kategori yang diterapkan adalah bagi rumah yang tidak layak huni dengan sasaran utama bagi keluarga miskin ekstrem. Proses pemilihan keluarga miskin dilakukan dengan penyesuaian data dan prioritas pemberian bantuan dengan verifikasi dan validasi (Verval). Proses Verval diklasifikasikan lagi menjadi 3, yaitu: 1) Rusak Ringan, 2) Rusak Sedang, dan Rusak Berat. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwasannya RTLH tahun 2019 mencapai 25.002 unit rumah. Verval yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu bentuk upaya agar program yang dibuat tepat sasaran. Adapun kondisi khusus, dimana ketika rumah tersebut tidak layak huni namun tidak ada penerus yang akan tinggal di rumah tersebut, maka tidak akan memperoleh bantuan dana perbaikan karena asumsi kebermanfaatan dan keberlanjutan.

Data verval yang ada pada tahun 2019 juga terus melakukan update. Hal ini diungkapkan pada saat wawancara, dimana sebelum memberikan bantuan, maka rumah calon penerima bantuan akan di cek kembali apakah masih memenuhi kriteria untuk menerima bantuan atau sudah layak dan tidak perlu menerima bantuan. Artinya, ketika rumah tersebut sudah layak, bantuan akan dialihkan ke prioritas lain untuk menerima bantuan. Selanjutnya, saat proses monitoring, tim verifikator turun ke masyarakat dan melihat kondisi masyarakat, apakah ada rumah yang ternyata masuk kategori RTLH namun belum terdata dalam verval. Ketika ada kasus tersebut, maka data akan dimasukkan ke program selanjutnya untuk memperoleh bantuan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwasannya proses menetapkan sasaran merupakan proses yang panjang dengan berbagai kriteria yang harus dipenuhi. Sehingga, para penerima bantuan memang orang – orang yang memang layak untuk mendapat stimulan bantuan untuk pembenaran rumah dari RTLH menjadi RLH. Hal tersebut juga disetujui oleh warga atau penerima bantuan saat kami mengunjungi rumah warga.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan indikator pertama terkait standar dan sasaran kebijakan dapat disimpulkan bahwasannya terdapat perubahan antara sebelum dan sesudah menerima program terutama secara fisik bangunan. Tujuan dari program juga memang tidak semuanya tercapai. Ketidaktercapaian tujuan tersebut dikarenakan tujuan kedua tidak memiliki indikator pasti untuk mengukur peningkatan tradisi gotong royong yang ada di masyarakat. Sedangkan, tujuan pertama dan ketiga mengalami peningkatan atau ketercapaian tujuan. Pada sisi lain, berbicara terkait kelompok sasaran, mendukung dan mempermudah pelaksanaan implementasi.

Sumber Daya

Pada indikator sumber daya menurut Van Meter dan Van Horn berbicara terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Kedua sumber daya tersebut tentunya berperan penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka pada bagian ini akan membahas secara dalam terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya finansial pada program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang*.

Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial mencakup anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang*. Untuk program tersebut di Kabupaten Wonogiri, sumber dana program ini bisa berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta bantuan pihak ketiga seperti lembaga non-pemerintah atau swasta.

Anggaran Pemerintah Daerah

Pendanaan utama untuk program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang* biasanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD dalam hal ini dibagi

lagi menjadi dua yaitu APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Wonogiri mengalokasikan sebagian dari APBD untuk mendanai program ini sebagai bagian dari upaya mereka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Anggaran Pemerintah Pusat

Bantuan dari Kementerian PUPR, di mana bantuan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah melalui BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Selain bantuan dari Kementerian PUPR, anggaran pemerintah pusat untuk program ini juga berasal dari Dana Insentif Daerah (DID). Dana tersebut merupakan bagian dari transfer ke daerah dan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada wilayah-wilayah tertentu yang dipilih berdasarkan kriteria atau kategori tertentu untuk diberikan penghargaan atas prestasi kinerja yang dicapai.

Bantuan dari Pihak Ketiga

Selain dari anggaran pemerintah, program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang* sering kali mendapatkan dukungan dari pihak ketiga, seperti dari *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adapun CSR yang berkontribusi terhadap sumber daya finansial program yaitu Bank Jateng dan BAZNAS Jateng.

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasannya secara keseluruhan pemerintah daerah mampu menjalin kerjasama dan menarik berbagai pihak untuk terlibat dalam program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang*. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya *stakeholders* yang terlibat untuk pemberian dana, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, pemerintah desa, CSR, bahkan hingga swadaya masyarakat. Hanya saja pada sisi lain, banyaknya jumlah RTLH yang harus diintervensi membuat anggaran yang didapatkan masyarakat juga tidak besar dan belum cukup untuk membiayai keseluruhan proses pembenahan rumah menjadi Rumah Layak Huni (RLH).

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Wonogiri sebagai penanggung jawab program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang*. Dalam Perkembangan perjalanan program Rumanis ini terutama saat terjadinya wabah Covid-19 pada saat itu terjadi kekurangan SDM dari Dispera KK. Namun, setelah tahun 2022 dikarenakan ada tambahan ASN baru pada Dispera KPP Kabupaten Wonogiri, program Rumanis Datang Si Kumis Hilang menjadi semakin lancar dan dapat melampaui target yang diberikan.

Tidak hanya Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri, program Rumanis Datang Si Kumis Hilang juga membutuhkan tenaga ahli dalam bidang konstruksi dan perumahan yang memiliki kemampuan teknis untuk merencanakan dan melaksanakan renovasi atau pembangunan rumah. Sejumlah 14 orang direkrut untuk bertindak sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan pada 2023, dalam melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni ini. Hanya saja banyaknya beban tugas yang diberikan kepada TFL tersebut ternyata tidak sesuai dengan jumlah TFL yang dimiliki. Pada 2023, jumlah TFL hanya sebanyak 14 orang dimana setiap orangnya menangani dan bertanggungjawab terhadap 40 rumah. Kondisi ini diminimalisir dengan penempatan yang berdekatan. Hanya saja, kondisi geografis Kabupaten Wonogiri tentunya tetap menjadi penghambat dimana jarak antar rumah bahkan kecamatan terbilang jauh.

Berdasarkan penjelasan – penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasannya banyak gejolak dalam sumber daya manusia, mulai dari kurangnya pegawai di lingkup dinas hingga TFL. Pada lingkup dinas, kekurangan pegawai tersebut telah mampu diatasi

dengan perekrutan ASN untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan terutama terkait RTLH. Hanya saja, permasalahan TFL masih terjadi. Hal ini tentunya menjadi permasalahan sendiri dalam pelaksanaan ditambah berdasarkan beban tugas yang berat dinyatakan bahwasannya pendapatan yang diperoleh pun tidak sesuai dengan beban kerja yang ada.

Komunikasi Organisasi

Komunikasi yang telah terjadi disini menunjukan karakteristik formalitas yang sudah berjalan baik, hal tersebut dapat ditemukan ketika adanya keluhan masyarakat akan menyampaikan kepada RT atau RW setempat lalu akan ditampung kemudian akan dimusyarawahkan ke Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri. Hal ini tergambar ketika ada ketidaksesuaian antara keinginan warga dengan hasil rumah yang telah jadi. Maka dari itu dilakukan komunikasi secara *bottom-up* ke Dispera. Komunikasi tidak hanya dilakukan secara *bottom-up* namun juga *top-down*. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan dari pemerintah mampu benar-benar disampaikan dan dipahami oleh masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya komunikasi formal sangat berjalan dalam pelaksanaan program.

Selain komunikasi formal, komunikasi yang sering digunakan dalam pelaksanaan program adalah komunikasi informal. Hal ini dirasa lebih bisa untuk memberikan pengertian-pengertian tertentu kepada masyarakat terutama jika terdapat permasalahan. Misalnya saja terdapat grup WhatsApp untuk berkomunikasi dan berkoordinasi terkait permasalahan yang ada di lapangan. Jika terjadi permasalahan misalnya penundaan pembangunan karena menunggu hari baik juga dilakukan komunikasi yang baik pula secara informal untuk mempermudah pencapaian kesepakatan.

Komunikasi yang baik, tergambar pula dari cara para pelaksana program menyampaikan program dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Misalnya saja saat masyarakat memperoleh bantuan dari program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang*, aparatur desa menyampaikannya dengan bahasa "bedah rumah". Kata tersebut lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Contoh tersebut merupakan salah satu contoh komunikasi yang bagus yang diterapkan dalam pelaksanaan program sehingga dapat diterima dengan baik juga oleh masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dispera dan KPP saat melakukan komunikasi dengan pihak desa yaitu terkait sinyal, karena ada wilayah di Wonogiri yang masih sulit mendapatkan akses sinyal. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, ketika terdapat informasi yang ingin disampaikan oleh Dispera dan KPP kepada masyarakat desa yang dituju, mereka menghubungi pihak desa dan kemudian meminta pihak desa untuk menyampaikan informasi tersebut.

Karakteristik Birokrasi Pelaksana

Dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui *Rumanis Datang Si Kumis Hilang*, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Dispera dan KPP) Kabupaten Wonogiri selaku pelaksana program, melibatkan pihak desa untuk membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan RTLH karena pihak desa dianggap lebih tahu kondisi riil di lapangan. Desa yang kemudian mendapatkan wewenang dari Dispera dan KKP, mendata rumah-rumah yang layak untuk diberikan bantuan dengan menyesuaikan kriteria-kriteria RTLH yang telah ditetapkan oleh Dispera dan KPP (seperti lantai hanya beralaskan tanah, dinding terbuat dari kayu) untuk melihat apakah rumah yang diusulkan oleh desa sudah sesuai dengan kriteria-kriteria RTLH tersebut atau tidak. Setelah melakukan pendataan, desa menyampaikan kepada Dispera dan KPP terkait usulan rumah-rumah mana saja yang telah mereka putuskan untuk mendapatkan bantuan.

Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri sendiri juga memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk program pengentasan kemiskinan RTLH. Namun, dalam pelaksanaannya, di masyarakat SOP tersebut tidak bersifat tertulis dan hanya berdasarkan kesepakatan-kesepakatan saja. Dispera dan KPP tidak akan kaku dan memaksakan sesuai dengan SOP mereka, karena harus mengikuti kondisi di lapangan. Selagi program tersebut berjalan dan tidak melanggar atau melewati tahun anggaran, maka tidak akan menjadi sebuah masalah. Sebagai contoh, Dispera dan KPP menetapkan waktu yang harus diselesaikan untuk membangun 1 rumah yaitu selama 7-10 hari. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, rumah tersebut bisa saja melewati batas waktu yang telah ditetapkan, karena di Kabupaten Wonogiri masih memiliki adat yang cukup kental, masyarakatnya mempercayai adanya hari baik, di mana saat memasuki hari-hari tersebut, semua aktivitas termasuk pembangunan rumah tidak boleh dilakukan dan akan dihentikan untuk sementara waktu.

Kemudian, saat pelaksanaan program RTL, Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri menyalurkan bantuan uang tunai tersebut kepada Pok Mas (Kelompok Masyarakat), yang nantinya bertanggung jawab bersama dengan TFL (Tim Fasilitator Lapangan) untuk membeli bahan dan material bangunan dari uang yang telah ditransfer oleh Dispera dan KPP. Untuk memastikan program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Dispera dan KPP tidak akan langsung mentransfer seluruh uang tersebut. Mereka akan membaginya menjadi dua termin atau dua kali pencairan dengan setiap terminnya dibagi menjadi 50% dan 50%. Jika pencairan dana pertama kemajuan pembangunannya dirasa telah sesuai dengan yang SOP yang ditetapkan, maka Dispera dan KPP akan melanjutkannya untuk pencairan tahap kedua.

TFL (Tim Fasilitator Lapangan) tak hanya bertanggung jawab dalam pembelian bahan dan material bangunan, namun mereka juga bertanggung jawab untuk menilai rumah mana saja yang layak untuk diberikan bantuan dan mengawasi jalannya program RLH di Kabupaten Wonogiri. TFL bukan berasal dari tim Dispera dan KPP, tetapi TFL merupakan pihak eksternal yang direkrut oleh Dispera dan KPP melalui sistem open recruitment. TFL yang terpilih merupakan orang-orang yang diyakini paham dengan wilayahnya masing-masing. Sebagai contoh, ada pendaftar yang berasal dari Baturetno, maka selain melihat persyaratan lainnya, Dispera dan KPP juga akan melihat asal wilayahnya, jika pendaftar tersebut dianggap layak untuk diloloskan, ia akan diupayakan untuk ditempatkan di Baturetno. Setelah terpilih, TFL akan diberi tanggung jawab untuk mengawasi 40 rumah yang akan dibangun dengan jarak masing-masing rumah berada di wilayah yang dekat, sehingga dapat mengurangi beban pekerjaan TFL tersebut.

Di samping itu, program pengentasan kemiskinan RTLH di Kabupaten Wonogiri tidak terdapat tumpang tindih kewenangan, baik antara desa, kecamatan, maupun Dispera dan KPP, karena koordinasi yang dilakukan terpusat pada satu pintu yaitu lewat Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri. Sebagai contoh, desa memiliki sumber keuangan tersendiri melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang salah satu pendanaannya digunakan untuk membangun atau memperbaiki RTLH di desa-desa yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kemudian, desa melakukan pendataan terkait rumah mana saja yang perlu mereka berikan melalui BUMDes tersebut. Setelahnya, desa menyampaikan kepada Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri bahwa mereka ingin membantu masyarakat ‘A, B, dan C’ untuk perbaikan RTLH. Namun, Dispera dan KPP mengatakan bahwa rumah ‘A, B’, dan C’ sudah masuk dalam daftar prioritas rumah yang akan mereka bantu dengan sumber pendanaan dari CSR atau Provinsi, sedangkan rumah ‘D, E, dan F’ tidak masuk dalam kriteria RTLH, sehingga mereka meminta desa untuk memilih rumah ‘D, E, dan F’ dijadikan sebagai penerima bantuan dengan pendanaannya yang bersumber dari desa.

Sikap Pelaksana

Sikap para pelaksana yaitu perangkat desa ketika melaksanakan program RTLH di lapangan sangat menentukan keberhasilan dari program RTLH. Perangkat desa memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan kebijakan RTLH dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di komunitas mereka. Pemahaman inilah akan memberikan respon kepada mereka terhadap kebijakan, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik. Respon yang diberikan perangkat desa terhadap kebijakan RTLH dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan ini dapat mendukung kepentingang masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Ketika sebuah kebijakan dirasa relevan dan mendukung kesejahteraan masyarakat, perangkat desa cenderung memberikan respon positif dan proaktif. Mereka menjadi sebuah jembatan penting antar pemerintah dengan masyarakat, untuk memastikan bahwasannya informasi dan instruksi yang diperoleh juga disampaikan jelas dan tepat.

Namun, ketika sebuah kebijakan publik bersifat *top down*, perangkat desa bisa menghadapi tantangan dengan menyesuaikan kebijakan yang mungkin tidak sepenuhnya dengan kondisi di lapangan. Pada kondisi ini sikap pelaksana yang adaptif dan komunikatif menjadi kunci utama. Pelaksana harus mampu memberikan *feedback* yang konstruktif kepada pembuat kebijakan untuk memastikan bahwasannya suara masyarakat di dengar dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Secara keseluruhan sikap pelaksana yang positif dan responsif juga kolaboratif ini sangat penting guna mengatasi tantangan yang ada untuk memastikan bahwasannya program RTLH dapat berjalan dengan efektif dan dapat memberikan manfaat yang maksimal dan cukup bagi masyarakat yang membutuhkan.

Respon positif dan mendukung kebijakan tersebut tentunya menjadi pendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Tidak hanya itu, adapula nilai yang dibawa oleh para pelaksana program yaitu nilai gotong royong. Nilai tersebut yang ingin dikembangkan oleh pelaksana mengingat anggaran yang diberikan kepada masyarakat bukanlah anggaran yang besar sehingga butuh swadaya dan gotong royong dari masyarakat. Sehingga, misalnya dalam anggaran untuk pekerja dapat dialihkan untuk kebutuhan lain dikarenakan sudah mendapat bantuan dari masyarakat untuk gotong royong bersama. Nilai inilah yang diupayakan untuk ditumbuhkan dan dikembangkan di masyarakat.

Sayangnya, ketika berbicara mengenai sikap pelaksana maka akan berbicara pula mengenai sikap dan komitmen pelaksana dalam ketercapaian program. Pada aspek ini memang komitmen baik dari masyarakat hingga pemerintah sangat tinggi untuk ketercapaian program. Hanya saja, pada pelaksanaannya belum ada pemantauan pasca program. Artinya ketika rumah – rumah tersebut yang sudah jadi tidak dilakukan pengecekan kebermanfaatannya secara berkala. Hal ini menjadi penting karena sejak awal pembangunan rumah untuk memberikan kebermanfaatan bagi pemiliknya. Pemantauan pasca program juga penting dilakukan agar kepemilikan rumah tersebut tidak disalahgunakan, seperti misalnya saja dijual.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Faktor-faktor Sosial yang mendukung yakni, kesadaran para masyarakat sasaran program yang tinggi tentang pentingnya rumah layak huni dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat mempercepat pelaksanaan program. Masyarakat yang memahami manfaat dari program ini cenderung mendukung dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaannya. Selanjutnya budaya gotong royong yang kuat dari masyarakat Kabupaten Wonogiri yang terjalin kuat dapat menjadi dukungan signifikan. Masyarakat yang terbiasa bekerja sama dapat membantu dalam proses renovasi dan perbaikan rumah, sehingga mengurangi biaya dan mempercepat pelaksanaan.

Adapun faktor Sosial yang dapat menghambat yakni kesadaran yang rendah dan pendidikan terbatas warga yang termasuk dalam kelompok warga memiliki keadaan kemiskinan yang ekstrem tentang pentingnya kondisi tempat tinggal yang layak dan tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi hambatan. Masyarakat dalam kondisi kemiskinan yang ekstrem tidak menyadari manfaat dari program ini mungkin tidak mendukung atau bahkan menolak partisipasi dalam program dan ini diperlukan komunikasi dan sosialisasi secara informal dari para pelaksana di lapangan dari RT, RW, Pokmas serta desa dan fasilitator lapangan. Terdapat beberapa contoh kasus RTLH misalnya saja masyarakat yang tidak mau pindah karena kepercayaan bahwa apabila rumah sudah dibangun, tidak boleh dirubah-rubah. Maka, ada pendekatan dari Dispera dan dari Desa, pendekatannya diberikan pengertian atau pemahaman.

Faktor ekonomi yang mendukung diantaranya dukungan finansial dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan pemerintah Kabupaten Wonogiri, serta BUMN dan Swasta Alokasi dana yang memadai dari pemerintah daerah dan pusat serta bantuan dari sektor swasta dapat memperkuat implementasi program. Dukungan finansial yang cukup memungkinkan pelaksanaan yang berkelanjutan dan menyeluruh sehingga program dapat berhasil mencapai targetnya yakni Zero (0) RTLH di kabupaten Wonogiri. Selanjutnya terjadi peningkatan ekonomi lokal dalam Pertumbuhan sehingga dapat meningkatkan kemampuan Masyarakat setempat dari pengadaan bahan-bahan material yang dibutuhkan dari toko bangunan sekitar area dan menyerap tenaga bangunan untuk berpartisipasi dalam program ini. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik bisa memberikan kontribusi lebih, baik dalam bentuk dana, tenaga kerja, maupun material. Untuk faktor ekonomi yang menghambat yakni keterbatasan penganggaran dari pemerintah Pusat dan daerah terutama saat Wabah COVID-19 yang melanda pada tahun 2021 dan 2022, tanpa dana yang memadai, maka program tidak dapat berjalan efektif dan sesuai rencana.

Selain itu, ada pula faktor stabilitas ekonomi nasional yang mempengaruhi dari program ini. Contohnya saja melemahnya mata uang Indonesia. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap harga dari bangunan yang akan diberikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Faktor ekonomi tersebut pada akhirnya diminimalisir dengan kenaikan bantuan setiap tahunnya. Berdasarkan wawancara, pada awalnya program ini hanya menganggarkan Rp 10.000.000 kepada masing – masing rumah hingga akhirnya sekarang mampu mencapai Rp20.000.000. Penyesuaian tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap faktor ekonomi yang muncul.

Sedangkan dari faktor politik yang mendukung yakni komitmen yang kuat dari pemerintah daerah kabupaten Wonogiri, khususnya dari kepala daerah dan pejabat terkait, dapat memastikan program ini mendapatkan prioritas dalam penganggaran dan pelaksanaan. Dukungan politik yang solid memungkinkan implementasi program berjalan lancar, dan juga stabilitas politik di Kabupaten Wonogiri memastikan kontinuitas program, karena pemerintahan yang stabil dan minim konflik politik memungkinkan pelaksanaan program berjalan tanpa gangguan.

Diskusi

Dari hasil analisis evaluasi implementasi yang melihat ketercapaian tujuan, maka program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang* dapat dikatakan berhasil. Oleh karena itu, program tersebut dapat terus dilakukan dengan perbaikan di beberapa indikator, seperti (1) pada indikator standar dan sasaran memerlukan indikator yang jelas dalam menilai dan mengukur keberhasilan dari tujuan, (2) Pada indikator sumber daya perlu adanya penambahan jumlah personil di TFL untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan program, (3) Pada indikator sikap pelaksana perlu adanya monitoring pasca program.

Dalam penelitian Zahroh & Hilmiyati (2024) menyatakan bahwa indikator

keberhasilan berperan penting dalam menilai sejauh mana pencapaian tujuan dari sebuah program yang telah dilakukan. Penilaian terhadap keberhasilan ini tidak terbatas pada hasil akhirnya saja, namun juga mencakup berbagai aspek seperti saat proses pelaksanaan program, manajemen program, serta dampak jangka panjang yang kemungkinan dapat terjadi. Senada dengan itu, penelitian Markic (2014) menyatakan bahwa indikator kinerja dianggap sebagai sebuah alat yang kuat bagi organisasi sektor publik untuk mengukur sejauh mana suatu program atau kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Kemudian, dalam penelitian Wilson et al., (2023) menyatakan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya bergantung pada aspek fisik, namun juga ditentukan oleh kesiapan SDM (kapasitasnya) dan kualitas perencanaan program yang baik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kesiapan program mencakup aspek fisik, SDM, dan perencanaan yang matang agar program yang dilakukan dapat berjalan dengan sesuai. Hal yang serupa juga ditemui dalam penelitian McGuier et al., (2024) yang menyatakan bahwa kekurangan staf atau anggota dapat menghambat implementasi program yang sedang dijalankan. Sehingga, perlu adanya jumlah personel yang cukup agar dapat memperlancar pelaksanaan program.

Lebih lanjut, dalam penelitian Ba (2021) menyatakan bahwa sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan desain kebijakan dan program yang lebih baik, keputusan operasional yang lebih baik, serta keputusan penetapan strategi yang baik. Sejalan dengan itu, penelitian Ivan (2020) menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi memiliki pengaruh yang positif terhadap keberhasilan suatu proyek atau program. Namun, dampak positif tersebut hanya akan muncul jika monitoring dan evaluasi direncanakan dengan baik sejak awal, jelas, dan bukan sekadar formalitas.

Di samping itu, dalam program Rumanis Datang Si Kumis Hilang Kabupaten Wonogiri, Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri memiliki mekanisme yang ketat dalam penyaluran keuangan sehingga potensi untuk penyelewenangan dana sangat kecil terjadi di tingkat masyarakat. Hal ini mendukung hasil riset Winarno (2018) yang menyatakan bahwa terdapat audit yang dilakukan oleh inspektorat daerah dan BPK pusat dalam program RLH (Rumah Layak Huni) yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung saat program tersebut selesai dilakukan, sehingga program ini memiliki tingkat transparansi anggaran yang jelas dan dapat meminimalisir terjadinya penyelewangan dana program.

Lalu, penelitian ini melengkapi hasil riset Rahmah & Subadi (2021) yang menyatakan bahwa program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Pamarangan Kiwa, Tabalong kurang melibatkan masyarakat dalam pembuatan rancangan atau perencanaan program. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian peneliti yang menyoroti adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program Rumanis Datang Si Kumis Hilang di Wonogiri, di mana komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat formal, namun juga informal. Lalu, pihak Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri selaku inisiator program melibatkan pihak-pihak desa untuk membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan RTLH, karena pihak desa dianggap lebih mengerti kondisi riil yang terjadi di lapangan, namun tetap saling melakukan koordinasi dua arah, tanpa melepas tangan begitu saja.

Terakhir, penelitian ini juga memperkaya hasil riset Putra et al., (2025) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya perlu menjalin kemitraan dengan berbagai *stakeholder* untuk mendukung pembiayaan program RTLH Dandan Omah. Dalam penelitian peneliti, program Rumanis Datang Si Kumis Hilang telah melibatkan berbagai macam sumber daya dalam pemenuhan pendanaan program, mulai dari dana

yang bersumber dari APBDes, APBD Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN, hingga bantuan dari Bank Jateng dan BAZNAS Jateng.

Kesimpulan

Berdasarkan ketiga tujuan program *Rumanis Datang Si Kumis Hilang* Kabupaten Wonogiri, dapat diketahui bahwasannya tidak semua tujuan memiliki indikator untuk menilai keberhasilan program. Tujuan yang memiliki indikator pengukuran keberhasilan ada pada tujuan pertama dan ketiga, sedangkan, tujuan kedua tidak memiliki indikator pengukuran yang jelas untuk menilai keberhasilan. Pada tujuan kedua program yaitu terkait meningkatkan tradisi gotong royong masyarakat Wonogiri, perlu adanya penetapan indikator pengukuran yang jelas, seperti persentase partisipasi masyarakat saat gotong royong pembangunan rumah, sehingga keberhasilan tujuan dapat diketahui dengan jelas dan pasti.

Sedangkan pada tujuan pertama program dapat dikatakan berhasil karena pemerintah daerah melalui Dispera berhasil memberikan stimulan kepada masyarakat berupa bantuan dana yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga swasta. Tujuan ketiga juga dikatakan berhasil dengan penurunan jumlah RTLH. Target yang ditetapkan juga berhasil dilakukan setiap tahunnya. Sedangkan, untuk tujuan kedua meskipun tidak ada ukuran yang tepat menyatakan keberhasilan tujuan, namun pada saat pelaksanaan dapat diketahui bahwasannya nilai gotong royong sangat melekat di masyarakat. Hal ini dibuktikan dari swadaya masyarakat untuk saling membantu dalam proses pembuatan rumah.

Kondisi-kondisi tersebut tentunya menjadi gambaran keberhasilan dari implementasi program Rumanis Datang Si Kumis Hilang. Keberhasilan dari proses implementasi tersebut tentunya didukung oleh kelima indikator lain. Meskipun, setiap indikator tersebut juga memiliki hambatannya masing – masing. Misalnya saja pada aspek sumber daya manusia, jumlah TFL dinilai masih kurang dengan beban pekerjaan yang sangat besar. Adapula, sumber daya finansial yang sudah melibatkan banyak pihak, namun pada realitanya stimulan yang diberikan kepada masyarakat dinilai masih kurang untuk perbaikan rumah, serta belum adanya monitoring pasca program, sehingga perlu adanya monitoring lanjutan yang jelas dan bisa diukur agar dapat memastikan manfaat program dapat terus berlanjut dan tidak menyimpang dari tujuan awal. Kondisi – kondisi inilah yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan program Rumanis Datang Si Kumis Hilang.

Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu faktor waktu, di mana penelitian hanya dilakukan selama 1 bulan dengan cakupan wilayah yang cukup luas yaitu Kabupaten Wonogiri. Maka dari itu, rekomendasi penelitian yang akan datang yaitu dapat melakukan studi longitudinal untuk mengamati perubahan dalam kurun waktu yang lebih panjang dengan data-data yang dikumpulkan lebih mendalam dan komprehensif agar dapat menggambarkan keberlanjutan manfaat dari program Rumanis Datang Si Kumis Hilang di Kabupaten Wonogiri dalam jangka panjang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri, Desa di Wonogiri yang kami datangi untuk penelitian, dan dosen pengampu penelitian yang telah membersamai dari awal hingga akhir, sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

Deklarasi Konflik Kepentingan

Penyusunan penelitian ini dilakukan tanpa adanya konflik kepentingan pihak manapun.

Referensi

Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniati, S., & Maulana, A. (2020). *Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Usulan Perbaikan*. https://www.tnp2k.go.id/download/79169WP480304FINAL.pdf

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, *1*(1), 1–11.

Arifin, S., & Sugiarto, L. (2020). Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengmebangan Inovasi Kebijakan Program Pembangunan Desa Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, *3*(1), 14–28. https://doi.org/10.15294/jphi.v3i1.40247

Ba, A. (2021). How to measure monitoring and evaluation system effectiveness? *African Evaluation Journal*, *9*(1). https://doi.org/10.4102/aej.v9i1.553

Bapperida Wonogiri. (2024). *Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Wonogiri*. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah Kabupaten Wonogiri.

Barkah, A., Mardiana, T., & Japar, M. (2020). Analisis Implementasi Metode Pembelajaran Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Mata Pelajaran Pkn. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, *7*(2), 123–136. https://doi.org/10.25134/pedagogi.v7i2.3426

BPS Jateng. (2024). *Kemiskinan*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQjMg==/kemiskinan.html

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Fourth Edi). SAGE Publications.

Dari, D. W., Apriliyani, D., & Handayani, W. (2022). Implementasi Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta Berbasis Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *10*(1), 1–8. http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma

Dewi, W. S., Purwanto, S., Rahmadani, A. D., Pranata, W. G., & Herdiansyah, G. (2023). Land suitability evaluation for Curcuma zedoaria Rosc. in the community forest of the upstream Bengawan Solo watershed, Wonogiri, Indonesia. *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, *10*(3), 4369–4377. https://doi.org/10.15243/jdmlm.2023.103.4369

Diskominfo Wonogiri. (2023). *Data Sektoral Kabupaten Wonogiri*. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonogiri. https://datasektoral.wonogirikab.go.id/datatahunan

Ekowati, M. R. L. (2009). *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoitis dan Praktis)*. Penerbit Pustaka Cakra.

Fitrianggraeni, S. (2019). Building business, enriching lives: an Indonesian initiative to empower women in the fishing communities. *WMU Journal of Maritime Affairs*, *18*(4), 595–616. https://doi.org/10.1007/s13437-019-00181-z

Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study*

of Operational Governance. SAGE Publications Inc.

Huseiny, M. I., Kuntoro, A. A., Nugroho, E. O., & Kusuma, M. S. B. (2024). Dam-Break Risk Analysis and Mitigation at Pidekso Dam, Wonogiri Regency, Central Java, Indonesia. *Journal of Water Management Modeling*, *32*. https://doi.org/10.14796/JWMM.C521

Ivan, T. (2020). The Influence of Monitoring and Evaluation on Project Performance. *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*.

Junaeny, F., Darmanto, & Darmi, T. (2025). Evaluasi Program PAMSIMAS: Studi Kebijakan PenyediaanAir Minum dan Sanitasi di Kecamatan Muruk RianKabupaten Tana Tidung. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, *11*(1), 84–101. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/enrichmentofpublicgovernance Kolaborasi:JurnalAdministrasiPublik,2025,

KKI Jateng. (2023). *Hingga Maret 2023, Jumlah Penduduk Miskin Jateng Capai 3,79 Juta Orang*. Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah. https://kkijateng.or.id/hingga-maret-2023-jumlah-penduduk-miskin-jateng-capai-379-juta-orang/

Kominfo Wonogiri. (2021). *Musrenbang 2022, Wonogiri Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/musrenbang-2022-wonogiri-prioritaskan-pengentasan-kemiskinan/

Latuamury, B., Sahureka, M., Imlabla, W. N., Hadijah, M. H., Sahusilawane, J. F., Marasabessy, H., & Talaohu, M. (2022). Land use change and baseflow recession modelling in Wuryantoro Watershed, Wonogiri Regency, Central Java Province, Indonesia. *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, *10*(1), 3871–3882. https://doi.org/10.15243/jdmlm.2022.101.3871

Liu, Y., & Xu, Y. (2016). A geographic identi fi cation of multidimensional poverty in rural China under the framework of sustainable livelihoods analysis. *Applied Geography*, *73*, 62–76. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.06.004

Markic, D. (2014). A Review on the Use of Performance Indicators in the Public Sector. *TEM Journal*, *3*(1), 22–28. https://doi.org/10.18421/tem31-04

Martitah, M., Sumarto, S., Yudhanti, R., & Prabowo, M. S. (2022). Legal Aspects in the Development of Tourism Villages in Wonogiri Regency Based on Local Wisdom. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, *5*(2), 275–302. https://doi.org/10.15294/jphi.v5i2.58176

McGuier, E. A., Kolko, D. J., Aarons, G. A., Schachter, A., Klem, M. Lou, Diabes, M. A., Weingart, L. R., Salas, E., & Wolk, C. B. (2024). Teamwork and implementation of innovations in healthcare and human service settings: a systematic review. *Implementation Science* , *19*(1), 1–19. https://doi.org/10.1186/s13012-024-01381-9

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications.

Mujiyo, Hardian, T., Widijanto, H., & Herawati, A. (2021). Effects of land use on soil degradation in Giriwoyo, Wonogiri, Indonesia. *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, *9*(1), 3063–3072. https://doi.org/10.15243/JDMLM.2021.091.3063

Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty eradication programs in Indonesia : Progress , challenges and reforms. *Journal of Policy Modeling*, *43*(6), 1204–1224. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002

Nugroho, R. (2020). *Public Policy 6* (Edisi Revi). Elex Media Komputindo.

Nurcholis, M., Yudiantoro, D. F., Haryanto, D., & Mirzam, A. (2017). Heavy metals

distribution in the Artisanal gold mining area in Wonogiri. *Indonesian Journal of Geography*, *49*(2), 133–144. https://doi.org/10.22146/ijg.15321

Nurtanti, S., Handayani, S., Ratnasari, N. Y., Husna, P. H., & Susanto, T. (2020). Characteristics, causality, and suicidal behavior: a qualitative study of family members with suicide history in Wonogiri, Indonesia. *Frontiers of Nursing*, *7*(2), 169–178. https://doi.org/10.2478/fon-2020-0016

Pemkab Wonogiri. (2022). *RUMANIS DATANG PAK KUMIS HILANG*. Pemerintah Kabupaten Wonogiri. https://gerbangindah.wonogirikab.go.id/inovasi/detail_pemerintah/2696

Praditia, M. D. (2023). *Mantap! Wonogiri Borong 2 Penghargaan Terinovatif di Ajang IGA 2023 Kemendagri*. Solopos. https://soloraya.solopos.com/mantap-wonogiri-borong-2-penghargaan-terinovatif-di-ajang-iga-2023-kemendagri-1818260

Pratiwi, D. N., & Ernawaty. (2023). Implementation of an Exclusive Breastfeeding Policy in Wonogiri Regency. *Indonesian Journal of Public Health*, *18*(1), 21–33. https://doi.org/10.20473/ijph.v18i1.2023.21-33

Putra, I. D., Rahmadanik, D., & Soesiantoro, A. (2025). Implementasi Program Dandan Omah untuk Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kota Surabaya. *PRAJA Observer:Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *5*(03), 180–188.

Rahmah, W., & Subadi, W. (2021). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, *4*(1), 258–270. https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/403

Ratnasari, N. Y., Husna, P. H., Marni, M., Nurtanti, S., & Susanto, T. (2020). Adherence to medication behavior among tuberculosis patients and their affecting factors: A cross-sectional study at Public Health Center of Wonogiri District, Indonesia. *Frontiers of Nursing*, *7*(3), 279–285. https://doi.org/10.2478/fon-2020-0024

Rendrarpoetri, B. L., Rustiadi, E., Fauzi, A., & Pravitasari, A. E. (2024). Sustainability Assessment of the Upstream Bengawan Solo Watershed in Wonogiri Regency, Central Java Province, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)* , *16*(5). https://doi.org/10.3390/su16051982

Setiawan, E., & Adhi Pramana, G. (2023). Improving the Effectiveness of Disaster Mitigation in Wonogiri Regency, Indonesia Using House of Risk Method. *Indonesian Journal of Geography*, *55*(3), 421–432. https://doi.org/10.22146/ijg.83856

Setkab RI. (2022). *Presiden Jokowi Keluarkan Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/presiden-jokowi-keluarkan-inpres-4-2022-tentang-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem/

Sudarmadi, A. (2023). *Kemiskinan Ekstrem Nasional Turun 0,62%, Pemerintah Perkuat Sinergi Melalui Forum Konsolidasi Pusat dan Daerah*. Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. https://bappeda.ntbprov.go.id/kemiskinan-ekstrem-nasional-turun-062-pemerintah-perkuat-sinergi-melalui-forum-konsolidasi-pusat-dan-daerah/

Temitope, T. (2023). Investigating Innovative Models of Governance and Collaboration for Effective Public Administration in a Multi-Stakeholder Landscape. *International Journal Papier Public Review*, *4*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.47667/ijppr.v4i2.209

Wilson, K. E. S., Wood, L., & Snelgrove, R. (2023). If You Build it Will They Come? The Mediating Roles of Human Resource and Program Capacities. *Recreational*

Sports Journal, *47*(1), 4–14. https://doi.org/10.1177/15588661221077695

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Edisi Revi). Media Pressindo.

Winarno, B. (2018). Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung. *Jurnal Pengembangan Kota*, *6*(1), 66–74.

Zahroh, F. L., & Hilmiyati, F. (2024). Indikator Keberhasilan dalam Evaluasi Program Pendidikan. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, *4*(03), 1052–1062. https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i03.5049